

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, diamanatkan bahwa pemerintah daerah menerapkan prinsip desentralisasi dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya ini memberikan kebebasan penuh untuk melaksanakan pemerintahan di wilayahnya secara mandiri yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa merupakan wilayah yang memiliki banyak potensi, bukan hanya mempunyai tenaga kerja yang berkualitas, tetapi juga memiliki kelimpahan sumber daya alam didalamnya. Desa mempunyai salah satu keistimewaan yaitu mempunyai pemerintahan yang berotonomi asli yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa memiliki hak otonomi untuk mengatur urusannya sendiri. Salah satu bentuk otonomi tersebut adalah memilih dengan melalui pemilihan kepala desa yang dipilih oleh warga desa itu sendiri.

Sebagai salah satu elemen penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yaitu kepala desa, kepala desa bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai tugas terkait pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dengan demikian pemerintah desa memiliki legitimasi penuh dan mempunyai wewenang untuk membuat peraturan sendiri yaitu peraturan desa yang merupakan peraturan hukum dan disahkan oleh kepala desa dengan pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa.

Desa menjadi tombak dalam pembangunan Indonesia yang memiliki peran utama dalam pembangunan nasional, hal tersebut dikarenakan banyaknya penduduk di Indonesia yang bermukim di wilayah pedesaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat bahwa pada tahun 2022 memiliki 4.982 desa tertinggal di Indonesia, yang merupakan 6,65% dari total keseluruhan desa yang memiliki status indeks desa membangun sebanyak 74.955 desa (Data Indonesia, 2022). Sedangkan, pada tahun 2023 tercatat terdapat 15,41% desa mandiri, 30,99% desa maju, 38,67% desa berkembang, 9,08% desa tertinggal, dan 5,85% desa sangat tertinggal (Kemendesa, 2023).

Kabupaten Cirebon sampai saat ini masih dihadapkan dengan tantangan pembangunan yang tidak sedikit. Masalah tingginya angka kemiskinan terjadi karena terbatasnya kesempatan kerja dan minimnya lapangan pekerjaan baru di sektor kewirausahaan. Selain itu, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga tergolong masih rendah, begitu pula dengan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat. Hal ini bahkan berdampak kepada sektor pertanian yang mengalami penurunan akibat perubahan fungsi lahan sebesar 193,8% Ha selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2022, provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak mencapai 49.405,8 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik, 2022). Jumlah penduduk yang tergolong miskin di Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 tercatat 266.10 ribu jiwa dengan presentase 12.01%. Pada posisi pertama adalah Kabupaten Bogor dengan total 474,72 jiwa penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2022).

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Indonesia**

Provinsi di Indonesia	Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa)		
	2020	2021	2022
Aceh	5 274,9	5 333,7	5 407,9
Sumatera Utara	14 799,4	14 936,2	15 115,2
Sumatera Barat	5 534,5	5 580,2	5 640,6
Riau	6 394,1	6 493,6	6 614,4
Kep. Riau	2 064,6	2 118,2	2 179,8
Jambi	3 548,2	3 585,1	3 631,1
Sumatera Selatan	8 467,4	8 550,9	8 657,0
Kep. Bangka Belitung	1 455,7	1 473,2	1 494,6
Bengkulu	2 010,7	2 032,9	2 060,1
Lampung	9 007,8	9 081,8	9 176,6
DKI Jakarta	10 562,1	10 609,7	10 680,0
Jawa Barat	48 274,2	48 782,4	49 405,8

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berkaitan dengan kondisi kemiskinan diatas, Pembangunan wilayah perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini yang digencarkan untuk dilakukan. Pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai suatu perubahan yang terjadi secara alami. Hal ini bertujuan untuk mencapai perubahan struktural yang diharapkan kedepannya (Muhammad Fathur Rohman, 2021). Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus publik yang dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi sosial, terutama kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dari berbagai elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Secara umum, pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan dan berbagai macam program pemberdayaan dan perlindungan sosial lainnya.

Pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut, melibatkan beberapa langkah nyata yang dilaksanakan serta melibatkan berbagai masukan untuk meningkatkan peluang sehingga dapat membantu masyarakat lebih berdaya dan keluar dari

keadaan yang tidak berdaya. Dalam konteks ini, pemerintah telah mengadopsi beberapa strategi inovatif untuk mengembangkan perekonomian di pedesaan dengan mendirikan lembaga usaha ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut sebagai BUMDes.

Pemberdayaan masyarakat dengan melalui Badan Usaha Milik Desa mengacu kepada upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan dan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi lokal dalam suatu daerah. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes yaitu memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan, bantuan, dan kebijakan yang memungkinkan BUMDes untuk berkembang dan memberdayakan masyarakat desa dengan efektif. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan masyarakat mandiri yang bukan hanya berorientasi pada aspek ekonomi, akan tetapi secara sosial, budaya, hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai menentukan hak berpolitik (Hamid, 2018).

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dan pendapatan masyarakatnya. Pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam memanfaatkan potensi di desa untuk kesejahteraan bersama. BUMDes didirikan dengan maksud untuk menampung tenaga kerja di desa dan meningkatkan kreativitas dan inovasi, dan

mencari peluang usaha ekonomi yang menguntungkan bagi mereka yang masih memiliki pendapatan rendah. Keberadaan BUMDes tentu memberikan kontribusi yang signifikan bagi desa dalam mendukung dan meningkatkan perekonomian desa tersebut. Beberapa di antaranya adalah melalui pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan sarana dan prasarana, serta mengurangi kemiskinan.

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perekonomian produktif desa dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, akuntabel*, serta berkelanjutan. Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukanlah pekerjaan yang sederhana. Desa akan mengalami perubahan dari tata pemerintahan yang hanya berurusan dengan administrasi dan politik menjadi sebuah entitas sosial yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kekuatan ekonomi melalui pemanfaatan potensi, aset, dan modal yang dimiliki (Suprpto, et.al., 2021).

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 mencakup layanan, distribusi, perdagangan hasil pertanian, serta industri kecil dan rumah tangga. Dengan adanya berbagai jenis usaha BUMDes ini, diharapkan kedepannya dapat memberikan manfaat dalam pengembangan desa, peningkatan pendapatan asli desa, pengembangan usaha, dan pemberdayaan pada masyarakat.

Pelaksanaan BUMDes di Indonesia masih belum dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh desa. Bahkan di beberapa daerah, tidak sedikit Badan Usaha Milik Desa yang belum berjalan efektif dan tidak mampu dalam memberikan kontribusi yang signifikan kepada pembangunan ekonomi juga pemberdayaan di

desa tersebut. Banyak BUMDes yang akhirnya stagnan karena masih belum optimal pengaturan organisasi yang baik didalamnya. Pengelola dalam Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu hal yang penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan BUMDes.

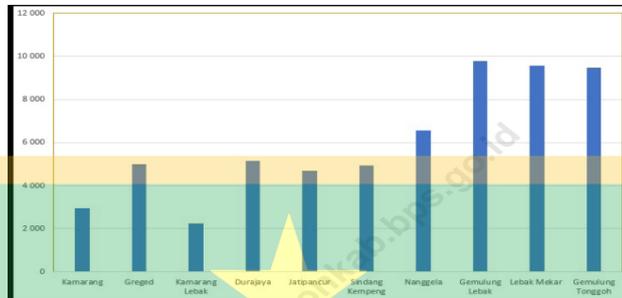
Terdapat 412 wilayah pedesaan di Kabupaten Cirebon, tercatat hanya terdapat 100 BUMDes yang aktif. Kecamatan Greged, di kabupaten Cirebon memiliki BUMDes yang aktif dari berbagai macam bidang kehidupan mulai dari bidang jasa, bidang pertanian, perkebunan, argowisata sampai kepada *home* industri. Desa Jatipancur merupakan desa di Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon Jawa Barat yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa. Berikut data jumlah penduduk dan luas total daerah di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, yaitu:

**Gambar 1.2**  
**Luas Total Daerah Kecamatan Greged**

Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Luas Total Area (km <sup>2</sup> /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan Percentage to Subdistrict Area
(1)	(2)	(3)
005 Kamarang	1,697	5,45
006 Greged	3,57	11,46
007 Kamarang Lebak	1,54	4,94
014 Durajaya	3,46	11,11
015 Jatipancur	3,21	10,3
016 Sindang Kempeung	2,381	7,64
017 Nanggela	3,3	10,59
001 Gemulung Lebak	4,54	14,57
002 Lebak Mekar	3,732	11,98
003 Gemulung Tonggoh	3,726	11,96
<b>Kecamatan Greged</b>	<b>31,156</b>	<b>100</b>

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon,2022)

**Gambar 1.3**  
**Data Jumlah Penduduk Kecamatan Greged**



Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon,2022)

Pada gambar 1.1, diperlihatkan bahwa Desa Jatipancur memiliki jumlah luas total daerah 321.082 ha/m<sup>2</sup>. Sedangkan, pada gambar 1.2 bahwa jumlah total penduduk Desa Jatipancur adalah 4.532 jiwa. Desa Jatipancur memiliki tanah persawahan sebesar 90.741 Ha, luas tanah pekarangan sebesar 47.985 Ha, mempunyai empat sumber mata air dan kebun bambu yang terdapat beberapa lokasi.

Mayoritas penduduk Desa Jatipancur bekerja dalam sektor pertanian dan perkebunan karena wilayah yang berada di daerah pegunungan, dan sisanya memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta, pedagang dan pegawai negeri sipil. Dalam hal memenuhi kebutuhan konsumsi, tidak semua masyarakat Desa Jatipancur memiliki kemampuan yang sama. Masyarakat dengan penghasilan rendah akan memiliki pola pengeluaran yang berbeda dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

Masyarakat yang memiliki penghasilan rendah mempunyai keterbatasan dikarenakan pendapatannya yang dibagi dengan kebutuhan pangan. Masyarakat Desa Jatipancur merasa kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari. Masyarakat Desa Jatipancur harus menempuh jarak jauh untuk membeli barang

kebutuhan pokok sehari-hari. Kesulitan yang dialami masyarakat Desa Jatipancur ini yang membuat pemerintah Desa Jatipancur membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa yang dikelola bersama dengan masyarakat, salah satu unit usahanya adalah BUMDes D’Kios yang merupakan program BUMDes Mart dari pemerintah Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Program BUMDes Mart merupakan inisiatif dari pemerintah Kabupaten Cirebon yang bekerja sama dengan Bank BJB.

BUMDes Desa Jatipancur bekerjasama dengan Bank BJB dalam program BUMDes *Mart* yang mengadopsi konsep minimarket modern yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pembangunan minimarket modern tersebut kemudian diberi nama D’Kios. Tujuan dari program ini adalah untuk mempermudah desa dalam menerima produk dari masyarakat dan meningkatkan perekonomian tingkat desa. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar desa mendapatkan bantuan dari program BUMDes ini. Persyaratannya yaitu patuh dalam melakukan pembayaran pajak selama dua tahun terakhir, administrasi yang patuh, kepatuhan dalam kepengurusan BUMDes serta usaha BUMDes yang dinilai layak ( Redaksi, 27 November 2020).

Program BUMDes Mart di Desa Jatipancur mengoptimalkan penggunaan pembayaran non-tunai dengan QRIS Payment. Selain menjual berbagai barang kebutuhan pokok sehari-hari, BUMDes Mart juga memberikan layanan pembayaran yang beragam. BUMDes Mart menyediakan layanan pembayaran pajak yang praktis dan cepat tanpa perlu antri dan menunggu lama. Pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi DIGI by bank BJB.

Dalam mendukung pengembangan BUMDes, pemerintah Desa Jatipancur bersama dengan pemerintahan Kabupaten Cirebon melakukan berbagai upaya dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola BUMDes. Salah satunya, adalah dengan menyelenggarakan pelatihan mengenai pemanfaatan pemasaran digital sebagai sarana promosi. Di saat BUMDes lain masih stagnan bahkan dikabarkan berhenti beroperasi, BUMDes D’Kios Desa Jatipancur tetap mempertahankan eksistensinya untuk mengembangkan ekonomi pedesaan. Akan tetapi, masih terdapat kendala yang dirasakan dalam pengelolaan BUMDes dan kendala dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

**Pertama**, sebagaimana informasi yang dipublikasikan dalam jurnal dikatakan bahwa dalam mengelola badan usaha ini tidak selalu berjalan dengan lancar, banyak permasalahan-permasalahan yang sering dijumpai. Terdapat beberapa permasalahan penting yang terkait dengan BUMDes seperti kualitas dan kapasitas pengelola, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan pemangku kepentingan, regulasi, dan dukungan dari desa (Hastowiyono, 2014). Hal ini, juga dilihat oleh peneliti bahwa keberadaan BUMDes Di Desa Jatipancur juga tidak terlepas dari masalah diatas.

**Kedua**, keberadaan BUMDes tidak terlepas dari berbagai hambatan yang ada, masyarakat desa masih belum sepenuhnya memahami makna akan adanya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Ismowati, et.al. 2022). Hal ini, Dilihat bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui tentang keberadaan BUMDes, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan secara merata. Pemerintah desa juga masih kurang dalam melakukan sosialisasi mengenai BUMDes sehingga

pemberdayaan masyarakat tidak berjalan optimal.

**Ketiga**, kendala yang muncul akibat pemerintah desa atau yang berasal dari pemerintah yaitu kurangnya pelayanan dan pemberian informasi serta pengarahan dari pemerintah tentang pemberdayaan. Beberapa pemerintah desa kurang berpartisipasi dan kurangnya melakukan pelatihan kepada unsur masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak memberikan kesempatan atau peluang kepada elemen yang lain untuk berpartisipasi/ terlibat maka partisipasi masyarakat sebagai salah satu elemen pemberdayaan masyarakat akan sulit terealisasi ( Windra Kurniawan, 2006).

**Keempat**, BUMDes D’Kios di Desa Jatipancur masih menghadapi kekurangan dari tenaga kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitasnya. Hal ini dilihat masih banyaknya masyarakat desa Jatipancur memilih bekerja di luar kota karena kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah desa. Selain itu, Partisipasi masyarakat juga dinilai masih sangat kurang dalam mendukung program BUMDes Mart.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemberdayaan masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa dengan judul **“ Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDes Mart Di Desa Jatipancur, Kecamatan Grege, Kabupaten Cirebon Jawa Barat Tahun 2022”**. Alasan peneliti, melakukan penelitian di Desa Jatipancur karena menurut peneliti hal tersebut merupakan sesuatu yang baru dikarenakan tidak semua desa memenuhi syarat untuk mendapatkan program BUMDes Mart ini. Desa Jatipancur dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan merupakan salah satu desa yang

memiliki BUMDes dan sudah berbadan hukum serta menjadi salah satu desa dengan BUMDes terbaik di Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Selain itu, kurangnya partisipasi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Jatipancur sehingga fenomena inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti hal tersebut. Periode dalam penelitian ini berlangsung pada tahun 2022, hal ini dikarenakan peneliti melihat pada tahun tersebut terjadi penurunan keterlibatan masyarakat dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa.

Penelitian ini memiliki tujuan yang signifikan karena BUMDes merupakan salah satu Langkah yang diambil untuk mengurangi kemiskinan yang terdapat di daerah-daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat. Keberadaan lembaga usaha ini diharapkan warga akan mandiri dan tidak terus bergantung pada pemerintah desa. Selain itu, keberadaan BUMDesa sangat penting dalam mendukung membangun dan mengembangkan ekonomi lokal sampai nasional. Melalui penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana pemerintah desa melalui program BUMDes Mart ini berperan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pelatihan dan keterampilan serta dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian tingkat desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah, yaitu Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Desa pada Program BUMDes Mart di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon Jawa Barat Tahun 2022 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa pada program BUMDes Mart di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon Jawa Barat tahun 2022.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang beragam. Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan juga menjadi suatu sumbangan pemikiran mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDes Mart Di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon Jawa Barat dan juga menjadi suatu alternatif bagi para peneliti selanjutnya untuk dapat memahami lebih dalam bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan peneyelenggara desa kepada masyarakat pada program BUMDes Mart di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi kelembagaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang membangun agar masyarakat dapat

lebih termotivasi untuk mengenali dan juga mengembangkan potensi yang ada di desa mereka.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tentang kekurangan yang ada di Badan usaha milik desa sehingga dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan BUMDes di masa depan.
3. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana administrasi publik (S.AP) pada program studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Nasional.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber alternatif dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dalam memiliki permasalahan serupa.

### **1.5 Sitematika Penulisan**

Agar dapat memperoleh penjelasan yang terarah dan komperhensif mengenai isi dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis telah menyusun struktur penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, merupakan bagian pendahuluan dalam penulisan penelitian skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, serta juga terdapat sistematika penulisan.

#### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, terdapat bagian yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain

sebagai referensi atau memiliki hubungan terhadap penelitian yang akan dilakukan . Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam menyusun kerangka teori penelitian. Terakhir dalam bab ini, terdapat kerangka pemikiran yang merupakan alur pemikiran dari peneliti terhadap masalah yang dibahas.

### **Bab III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, terdapat bagian yang membahas mengenai metode dan pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengembangkan data dan informasi. Bagian ini mencakup pendekatan penelitian yang akan digunakan, penentuan informan untuk mendapatkan data dan informasi, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, lokasi serta jadwal penelitian akan dilaksanakan, serta teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan.

### **Bab IV**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap suatu permasalahan yang menjadi fokus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini mencakup, gambaran umum dari lokasi penelitian yang dilakukan, hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian secara mendalam.

## **Bab V        PENUTUP**

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap suatu permasalahan yang menjadi fokus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini mencakup, gambaran umum dari lokasi penelitian yang dilakukan, hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

